

Implementasi Kebijakan Sister City Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig (Jerman)

Rd. Nia Kania Kurniawati

Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : kurniawati@untirta.ac.id

Abstrak

Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memungkinkan pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia membuat perjanjian dengan provinsi atau kota di negara lain. Di Indonesia tercatat bahwa pada saat ini terdapat sekitar 100 kerjasama internasional yang berbentuk sisterhood. Hubungan yang telah ada itu kemudian seharusnya dibina dan dikembangkan melalui berbagai level kebijakan untuk menjaga sejarah, dan mendapatkan hasil luaran yang bisa dikerjakan bersama di masa sekarang dan yang akan datang. Akan tetapi secara umum, jalinan *sister city* ini hanya 15% yang masih tetap berjalan, kemudian tidak sampai 20% berjalan dengan seadanya dan sisanya lebih dari 65% hampir tidak melakukan kegiatan apapun. Kota Bandung telah menjalin kemitraan dengan 5 kota di dunia antara lain yaitu: Braunschweig (Jerman, sejak tahun 1960), Fort Worth (AS, sejak tahun 1990), Suwon (Korea Selatan), dan Yingkou dan Lizhuo (RRC). Sedangkan jalinan dengan kota-kota di dalam negeri yaitu dengan kota Surabaya dan Kota Batam dengan maksud untuk saling mengisi dalam berbagai bidang kegiatan dan juga untuk menjaga dan memelihara hubungan baik antar pemerintah (Sekda Kota Bandung, 2011:7). Kota Braunschweig, Jerman dengan Kota Bandung merupakan jalinan *sister city* terlama di Indonesia dan pelopor bagi pembentukan *sister city* lainnya. Bidang kerjasamanya meliputi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertukaran pemuda, pelatihan, kesenian dan olahraga. Namun jalinan antara Bandung – Braunschweig kemudian tersendat di awal tahun 2002. Menggunakan metode deksriptif kualitatif dan mengacu kepada kebijakan Publik George C. Edward penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kesepakatan *sister city* Pemkot Bandung dengan kota Braunschweig, dari segi komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi tidak ada kelanjutan yang berarti setelah MoU ditandatangani atau menjadi silent Mou. Atau dengan kata lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tidak terpenuhi dengan baik.

Kata Kunci : *sister city, implementasi, kebijakan publik, kemitraan, silent Mou*

1. Pendahuluan

Dalam politik dunia kontemporer seperti yang digambarkan oleh perspektif pluralis, aktor internasional terdiri dari aktor negara dan aktor non negara. Keduanya memiliki peran penting dalam interaksi dari internasional. Salah satu dari

konsep utama yang dipakai untuk menggambarkan sifat sistem internasional kontemporer adalah interdependensi. Konsep itu menyatakan bahwa negara bukan aktor independen secara keseluruhan, negara bergantung satu sama lainnya. Tidak ada satu negara pun

seluruhnya bisa memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumber daya dan produk dari lainnya.

Sebagian besar cara pengklasifikasian aktor dalam hubungan internasional modern menekankan pentingnya faktor-faktor struktural, yakni untuk mengetahui bagaimana sebuah kelompok masyarakat mengorganisir diri untuk membuat keputusan yang otoritatif, yang mengikat semua anggota kelompok itu dan untuk mengenali pola perilaku manakah yang menjadi standar kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia, baik level provinsi, kabupaten, atau kota berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memungkinkan pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia membuat perjanjian dengan provinsi atau kota di negara lain.

Negara dan perkotaan pada saat ini bersaing dengan tempat lain dalam mendapatkan perhatian antara lain melalui investasi, wisatawan, pembeli, kegiatan, keterbukaan pasar, peningkatan mobilitas investasi dan bisnis tempat tinggal, tenaga kerja terampil, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya. Perkotaan pada saat ini bersaing dengan tempat lain untuk mendapatkan perhatian melalui investasi, wisatawan, pembeli, kegiatan, keterbukaan pasar, peningkatan mobilitas investasi dan

bisnis tempat tinggal, tenaga kerja terampil, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya. Globalisasi persaingan, peningkatan mobilitas investasi dan tenaga kerja terampil, keterbukaan pasar, dampak perubahan teknologi serta pasar pariwisata mengubah konsumen untuk menciptakan tantangan yang cukup besar serta peluang menarik untuk tempat. Sehingga menyebabkan situasi di mana kompetitor utama tidak lagi dengan kota di kawasan yang sama, tetapi di mana kota-kota di berbagai belahan dunia lainnya dan langsung mempengaruhi semua kota dan lokus konsentrasi permukiman perkotaan. Pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia, baik level provinsi, kabupaten, atau kota perlu melakukan *City Branding*, agar daerahnya bisa makin dikenal, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya makin meningkat.

Salah satunya dengan *Sister city* atau dikenal juga sebagai *twin town*, *friendship town*, *partner town*, atau *brother city*, adalah sebuah konsep dimana suatu kota yang secara geografis dan politik berbeda dipasangkan untuk tujuan menumbuhkan kerjasama dan komunikasi. Kota Braunschweig, Jerman menjadi *sister city* terlama Kota Bandung dan bahkan merupakan kerjasama yang paling lama di Indonesia. Bidang kerjasama meliputi

ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertukaran pemuda, pelatihan, kesenian dan olahraga. Titik beratnya pada bidang sosial budaya, pelatihan dan pertukaran pemuda.

Kemitraan yang telah dijalin sebelumnya ini harus terus dievaluasi, dikaji, dan dipelihara, bahkan terus dikembangkan selama kemitraan yang dijalin menunjukkan kinerja yang baik. Penelitian sebelumnya, telah memeriksa bahwa kesuksesan kemitraan *sister city* dipengaruhi faktor – faktor, diantaranya keterbukaan informasi, berbagi biaya, kepemimpinan, hubungan timbal balik, dan partisipasi publik (J. C. De Villiers, 2009; Gomes-Casseres, 1998; Tjandradewi & Marcotullio, 2009, dalam Rochman, 2019).

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan *sister city* antara kota Bandung dan kota Braunschweig hingga tahun 2020 ini?

2. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006:4). Dengan

tradisi Studi kasus yang merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang menelaah dan satu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Pada penelitian yang menggunakan metode ini, berbagai variabelnya ditelaah dan ditelusuri, termasuk kemungkinan hubungan antarvariabel yang ada. Karenanya, penelitian suatu kasus, bisa jadi melahirkan pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi, eksplanasi tersebut tidak dapat diangkat sebagai suatu generalisasi (Ardianto, 2010:64).

Pemilihan informan dengan sendirinya perlu dilakukan secara *purposive sampling* (bukan secara acak) yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian. Informan peneliti adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan. (Sugiyono, 2014:218). Peneliti telah memilih 4 (empat) orang narasumber dengan pertimbangan informan yang diwawancara memberikan data yang dibutuhkan secara valid.

Menurut Sanafiah Faisal (1999) dalam Sugiyono (2014:221) informan atau sampel sebagai sumber data sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Informan yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturisasi, sehingga sesuatu itu bukan hanya sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Informan yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Informan memiliki waktu yang memadai
4. Informan yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Wawancara ini dilakukan dengan para narasumber atau pakar terkait dengan kebijakan *sister city* Kota Bandung dan Kota Braunschweig. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, website, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

Analisis data pada penelitian ini karena bersifat penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:245) dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Miles dan Huberman (2009:16-19) mengemukakan bahwa terdapat langkah-langkah dalam analisis data yaitu reduksi

data, display data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjabaran dari masing-masing langkah adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data
diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi sebelumnya seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data atau proses transformasi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2009:16).
2. Penyajian data
Dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai jenis seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apayang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna (Miles dan Huberman, 2009:17-18).

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi
Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari 'arti' benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola,

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang kompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles dan Huberman, 2009: 19).

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijaksanaan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Hal ini sebenarnya menyangkut suatu dimensi yang sangat luas, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu yang

ada dalam suatu komunitas dalam masyarakat (Alam, 2012; 4).

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang padadasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara itu, aktivitas intelektual meliputi perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan (Aneta, 2010; 55).

Kebijakan publik menurut pendapat Dye adalah *whatever governments choose to do or no to do*. Maknanya adalah apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan tersebut harus dimaknai dengan dua hal penting, yaitu kebijakan harus dilakukan oleh badan pemerintah dan kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukann atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Indiahono, 2009:17). Anderson (Winarno, 2012:21) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor

atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap proses atau pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Model manajemen implementasi menurut Nugroho (2009: 24) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir.

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor

melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan factual (Agustino, 2016).

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kota kembar atau kota bersaudara adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antarpenduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Konsep kota kembar bisa diumpamakan sebagai sahabat pena antara dua kota. Hubungan kota kembar sangat bermanfaat bagi program pertukaran pelajar dan kerjasama di bidang budaya dan perdagangan. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika memilih ataupun melakukan *Sister City* antara lain adalah sebagai berikut

A. Bidang Umum:

1. Populasi dan Demografi
2. Lokasi geografi dan aset-asetnya

3. Kemudahan akses
4. Perbandingan terhadap industri-industri kunci
5. Hubungan yang ada (misal pertukaran pelajar)
6. Relevansi terhadap komunitas lokal
7. Sejarah bersama dalam hubungan politik dan atau kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, komersial dan budaya

B. Bidang Ekonomi

1. Memiliki kondisi ekonomi yang sama
2. Iklim dan peluang perdagangan dan investasi
3. Potensi pariwisata

C. Bidang Sosial:

1. Memiliki persamaan infrastruktur dan isu-isu sosial
2. Peluang untuk aktivitas yang lebih luas
3. Keinginan, kemauan dan komitmen dari warganya

D. Bidang Pendidikan

1. Lintas isu ekonomi, sosial dan lingkungan
2. Program pertukaran guru dan murid
3. Hubungan antar universitas

Dengan demikian, melihat berbagai faktor diatas, sangatlah perlu untuk membandingkan bukan saja kesamaannya

tetapi juga potensi dari berbagai kesamaan ini untuk menciptakan keuntungan bersama antar kota yang saling terlibat sebagai kota kembar tersebut.

Hubungan yang telah ada itu kemudian harus dibina dan dikembangkan melalui berbagai level komunikasi, menjaga sejarah bersama, outcomenya, keuntungan yang bisa dilihat dan proyek-proyek yang bisa dikerjakan bersama di masa sekarang dan yang akan datang.

Bandung adalah kota pilihan untuk melanjutkan sekolah perguruan tinggi karena di kota ini terdapat lima perguruan tinggi negeri yakni Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati, dan STIA-LAN. Terdapat pula sekitar 40 perguruan tinggi swasta dari berbagai strata, mulai dari program diploma 3 sampai program S3. Hal tersebut menjadikan Kota Bandung merasa sah 35 untuk menganggap dirinya sebagai pusat kegiatan pendidikan tinggi (beritaid, 2018).

Sedangkan Kota Braunschweig terletak di bagian Barat Laut Jerman lebih tepatnya di Negara Niedersachsen atau biasa juga disebut Niedersachsen yang merupakan Negara bagian Jerman merupakan salah satu dari tiga kota besar di Jerman bersama 47 Hannover dan Berlin serta memiliki jumlah penduduk 251.364

Jiwa (2015). Dengan luas area sebesar 192 km², Lokasi kota Braunschweig dikelilingi oleh perbukitan dan iklim cuaca yang dingin layaknya Kota Bandung. Kota Braunschweig menjadi rumah bagi tiga universitas ternama yaitu The Technical University, Institut Martino-Katharineum serta Universitas seni Hochschule für Bildende Künste Braunschweig dan sejumlah institusi besar negara serta tempat penelitian sehingga dapat dikatakan sebagai kota yang unggul dalam bidang pendidikan (Braunschweig Stadtmarketing GmbH, 2009, hal. 11).

24 Mei 1960, Dewan Kota Braunschweig dengan suara bulat bermitra dengan Bandung, dimana penandatanganan Piagam Ikatan Persahabatan Bandung-Braunschweig dilakukan oleh Duta Besar RI, Dr Zairin Zain dan Hans Gunther Weber (Direktur Kota) dan Oberbürgermeister (Wali Kota Braunschweig) Martha Fuchs. Piagam tersebut kemudian disempurnakan setelah ditandatangani oleh walikota Bandung, R Priatnakusumah serta utusan Braunschweig Prof Dr George Eckert pada tanggal 2 Juni 1960 di Bandung. Yang selanjutnya ditandatangani oleh Konsul Jenderal dan petugas kota, Hans-Gunther Weber dan Ibu Walikota Martha Fuchs dalam sebuah akta kemitraan.

Pada tahun 1961 "Hari Budaya Jerman-Indonesia" yang pertama sukses besar diadakan di Auditorium Institut Teknologi Bandung (ITB). Dan atas undangan atase kebudayaan Indonesia, pada bulan Desember 1962 di Braunschweig, mahasiswa Indonesia berkunjung di universitas-universitas Eropa. Dilanjutkan "Bahasa Indonesia Hari Budaya" yang kedua diselenggarakan pada bulan Mei 1964 di Brunswick. Dari berdirinya sampai hari ini "Hari Kebudayaan Indonesia", Masyarakat Jerman-Indonesia pada tanggal 30 Mei 1964 "dengan tujuan untuk mempromosikan Jerman-Indonesia sebagai bagian dari perjanjian di bidang budaya, sosial dan politik" diteruskan. Hal ini juga menjadi kesepakatan pertama antara kota di Jerman dan sebuah kota di Asia Tenggara (Sinaga, 2010, hal. 37).

Wali Kota Bandung Dada Rosada (2012) mengatakan, kerja sama internasional merupakan aset yang sangat berharga untuk diberdayakan. Program *sister city* Bandung-Braunschweig dinilainya telah menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.

Kerjasama yang berlangsung ini telah menghasilkan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan antara kedua kota, yaitu dalam bidang:

1. Kebudayaan

2. Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. Program Redaktur Radio
 - b. Program Pelatihan Hotel dan Gastronomi (restoran)
 - c. Program Studi Dosen, Mahasiswa
 - d. Program Pelatihan Mahasiswa
 - e. Program Pelatihan Percetakan/Grafika
 3. Program Peningkatan Sektor Pariwisata
 4. Program Olah Raga
 5. Program Pertukaran Pemuda
 6. Program Kunjungan
 7. Program Ekonomi dan Perdagangan
- Kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain:
1. Pembangunan Gedung Gelanggang Generasi Muda Bandung Jl. Merdeka No. 64 Bandung
 2. Bantuan alat pemotong hewan
 3. Bantuan mobil VW Combi, mesin tik dan alat proyektor
 4. Penataan kota
 5. Bantuan alat kesehatan
 6. Bantuan bagi Perguruan Tinggi
 7. Bantuan survey untuk penataan Kali Cikapundung
 8. Pelatihan peningkatan SDM Pemerintah Kota Bandung
 9. Bantuan bencana alam tsunami
 10. Pertukaran pemuda/siswa

11. Magang pejabat pemerintah Kota Bandung
12. Penampilan tari kesenian
13. Pameran Dagang/Expo Hannover 2000 (*Sister City of Bandung*, 2011:22-23)

Setelah penandatanganan MoU diharapkan dapat terlaksananya program kegiatan dari bidang – bidang yang telah disepakati dalam perjanjian. Tapi pada pelaksanaannya selama bertahun-tahun yang dilakukan hanya bersifat kunjungan (Alam dan Sudirman, 2020). Pada akhir tahun 2016 pihak Braunschweig memulai menjalin komunikasi lagi dengan mengunjungi Pemerintah Kota Bandung. Tepatnya bulan Februari tahun 2016, pemerintah kota Braunschweig melakukan kunjungan ke kota Bandung sebagai dampak dari kegiatan peringatan 55 tahun sejak terjalinnya hubungan persaudaraan antara kota Bandung dan kota Braunschweig.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama kedua kota dengan menandatangani Dokumen *Minutes of Meeting*. Dalam pelaksanaannya, setelah diperbaharunya piagam persahabatan menjadi Memorandum of Understanding tidak memberikan kontribusi kepada kota Bandung dikarenakan pengimplementasian yang dilakukan pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak adanya

kontribusi yang diberikan oleh kota Bandung disebabkan oleh beberapa hambatan seperti kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua kota yang didalamnya diperlukan partisipasi aktif masyarakat kota dalam menjalankan kegiatan.

Hal ini diperburuk oleh diratakannya Gelanggang Generasi Muda atau disingkat GGM, yaitu suatu tempat yang digunakan oleh masyarakat kota Bandung, sebagai tempat kegiatan di bidang olah raga, seni budaya, dan pengetahuan ketrampilan. GGM beralamat di Jalan Merdeka Nomor, 64 Bandung 40155 dan di samping gedung tersebut telah ada sekretariat *Bandung Bronswien*. *Bandung Bronswien* merupakan lembaga hasil kerjasama antara kota Bandung dengan pemerintahan Jerman. Kerjasama itulah yang juga menghasilkan kesepakatan adanya bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama CAS untuk membangun gedung tersebut dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud pada tanggal 5 November 1976. Gedung bersejarah itupun telah menjadi suatu Gedung baru setelah peletakan batu pertama pada Selasa, 4 September 2018, dengan anggaran sekira Rp 15,7 miliar dari APBD Kota Bandung.

Di bulan Februari 2019, Konsulat Jenderal RI Hamburg, Bambang Susanto datang menemui Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana untuk mendiskusikan rencana perayaan. Sebagai agenda pembuka, Pemerintah Kota Braunschweig akan menyelenggarakan "Culture Night 2019 – Culture Connects: Braunschweig's Twin Cities Join In" di Braunschweig pada 22 Juni 2019 mendatang. Acara ini untuk mempererat hubungan antara kota kembar Braunschweig, ada 9 kota yang akan berpartisipasi di ajang tersebut. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan (2020) menyambut baik undangan tersebut. Menurutnya, kerja sama dengan Braunschweig bukan sekadar memberikan manfaat bagi kota secara institusi, tetapi juga telah menumbuhkan persaudaraan antara warga kedua kota. Ia mengatakan "*Banyak warga Bandung yang jadi bersaudara dengan warga Braunschweig karena dulu pertukaran mahasiswa itu*". Pemkot Bandung juga berencana memperpanjang masa kerja sama Kota Bandung dan Braunschweig. Wakil wali kota menilai momentum 60 tahun *sister city* ini sangat pas untuk melanjutkan kerja sama. Justru dengan fakta pernyataan diatas memberikan kesan bahwa Kota Bandung tidak siap untuk melakukan kunjungan

ataupun rencana kerjasama akan seperti apa.

Pada kesempatan wawancara bersama informan B menguatkan dengan mengatakan "*Kadang saya kapok berurusan dengan birokrasi Pemda Jabar, antara satu bagian dengan bagian lain tidak saling dukung. Apalagi kalau pejabatnya berganti, urusan yang sudah disepakati bisa buyar. Tapi mau bagaimana lagi? Itulah birokrasi kita*," tuturnya. (NP, 2012). Ia pun mempertegas dengan memaparkan sejumlah pengalaman investor yang dibawanya, setelah "dipingpong" dari satu bagian ke bagian lain akhirnya mengatakan, "I give up". "*Saya nggak mengerti kenapa bisa begitu*," ucapnya.

Bahkan informan M, mengatakan bahwa birokrat Kota Bandung kurang mahir dalam Bahasa Inggris, apalagi B. Jerman. M, merupakan orang Indonesia yang menikah dengan orang Jerman, dan telah seringkali menjadi penterjemah bagi pejabat kota Bandung yang sedang berkunjung kesana. Ini diperkuat oleh perkataan dari wakil walikota Kota Bandung, Yana Mulyana yang mengatakan bahwa "*Kita akan menjajaki kerja sama baru, bisa dalam bidang teknologi atau lainnya. Saya minta OPD terkait untuk mengkaji dan membentuk tim*."

Alhasil secara singkat dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam mekanisme implementasi Kerjasama *Sister City* antara lain : 1) Kelemahan dalam menyusun dan menulis naskah kerjasama lanjutan. 2) Kendala staff pelaksana kegiatan kerjasama dalam pemahaman dan penguasaan bahasa asing terutama bahasa Inggris. 3) Adanya keterbatasan jumlah staff yang menangani urusan kerjasama. 4) Kurangnya motivasi oleh pemerintah setempat untuk menindaklanjuti kegiatan yang telah dilaksanakan untuk keberlanjutan program kerjasama.

Dengan demikian, terdapat masalah pada aspek implementasi, yang terletak pada instrumen komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan pemanfaatan serta pengendalian disposisi, yang dilaksanakan tidak secara sinkron atau sesuai dengan keinginan dari stakeholders.. Sehingga menurut penulis setelah penandatanganan MoU tidak ada tindak lanjut yang berarti kedua belah pihak dan lebih kepada seremonial belaka. yang seharusnya program kerjasama yang

4. Simpulan

Program *Sister City* memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam komunikasi dan kebijakan publik internasional dengan cara yang unik dan bermakna, dan membawa manfaat

jangka panjang bagi komunitas lokal dan mitranya di luar negeri. Hubungan *Sister City* memungkinkan masyarakat global untuk bertukar ide, mendapatkan perspektif internasional dan meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu global.

Akan tetapi jika tidak memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 03 Tahun 2008, yaitu 1) kesetaraan status administrasi, 2) kesamaan karakteristik, 3) kesamaan permasalahan. 4) upaya saling melengkapi, dan 5) peningkatan hubungan kerjasama, maka dapat dipahami jika kesepakatan *sister city* Pemkot Bandung dengan sejumlah kota di dunia terutama kota Braunschweig tidak akan berkelanjutan dan tinggal sebuah tugu kenangan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- A.G Subarsono.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jakarta: Ar-Ruzz Media

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Islamy, M.Irfan. 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Miles & Huberman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Sumber Internet :

<http://bappeda.semarangkota.go.id> Diakses pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 20.20 WIB.

[https://www.beritabaik.id/read?editorialSlu](https://www.beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-)

[g=indonesia-](https://www.beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1537767475342-)

[baik&slug=1537767475342-](https://www.beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1537767475342-bandung-kota-gudangnya-)

[bandung-kota-gudangnya-](https://www.beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1537767475342-bandung-kota-gudangnya-perguruan-tinggi)
[perguruan-tinggi](https://www.beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1537767475342-bandung-kota-gudangnya-perguruan-tinggi), diakses pada tanggal 12 Juli 2020, pukul 11.40 WIB

Artikel Jurnal :

[https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31](https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50)
-50 Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City

Mufidah Fahri. 2018. Skripsi. *Dinamika Kerjasama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City*

Selvinda Novintan Putri. 2017. Kegagalan Kerjasama Sister City Kota Semarang Dengan Kota Beihai

Ethos : Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 7, No.2, Juni 2019: 200-209 200
Pengelolaan Kota Melalui Jejaring Sister City: Kasus Studi Dari

Indonesia 1 Gina Puspitasari
Rochman.